

ABSTRAK

Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu tempat pembinaan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, di dalam Lembaga Pemasyarakatan warga binaan di bina agar saat keluar dari lembaga pemasyarakatan menjadi seseorang yang baik dan dapat diterima didalam lingkungan masyarakat. Kebutuhan seksual warga binaan telah menjadi permasalahan besar dalam sistem pemasyarakatan nasional Indonesia. Sampai saat ini, kebutuhan tersebut belum ada aturan khusus yang menatur. Padahal tidak dapat dipungkiri bahwa kegagalan Negara dalam memenuhi kebutuhan seksual warga binaan dapat menyebabkan berbagai akibat negatif, seperti kekerasan seksual. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan dalam perananan Lembaga Pemasyarakatan terhadap warga binaan penyimpangan seksual selama ini masih belum ada aturan khusus, sehingga menimbulkan banyak permasalahan yang menimpa warga binaan penyimpangan seksual. Seharusnya dengan melihat kondisi warga binaan yang mengalami penyimpangan seksual maka diperlukan aturan khusus untuk warga binaan yang mengalami penyimpangan seksual.

Kata Kunci : Lembaga Pemasyarakatan, Penyimpangan Seksual, Pembinaan khusus

ABSTRACT

Institution of correctional is a fostering place for people who commit a criminal offense. Inside of this institution, The inmates being fostered in purpose that when they leave the correctional institution they could be a better person and also being accepted in social life. The inmate's sexual necessity has been a serious problem for the indonesian social penal system. At this moment, there is no spesific rules for this necessity. Whereas, it can't be unwill that there is a fail in this country for resolve this sexual necessity so that caused some negative consequences, like a sexual violence. The result of this observation indicate that in ordinance law number 12 of 1995 concerning the intimates of correctional institution, there is no spesific rules that can be regulate, so that caused many problem for The inmates. Actually, according this condition the inmates who experienced the sexual deviation should be ruled in a spesific rules.

Keywords : Correctional Institutions, Sexual Irregularities, Special Guidance

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian	6
1.5 Keaslian	8
1.6 Metode Penelitian	12
1.6.1 Jenis Penelitian	12
1.6.2 Pendekatan.....	12
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	13
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	15
1.6.5 Analisa Bahan Hukum.....	15
1.6.6 Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN YANG MENGALAMI PENYIMPANGAN SEKSUAL	17
2.1. Lembaga Pemasyarakatan	17
2.1.1 Peran, Sistem dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan	17
2.2. Tinjauan Umum Warga binaan.....	25
2.2.1. Tinjauan Umum Tentang Warga Binaan yang Melakukan Penyimpangan Seksual	25
2.2.2. Teori Hukum Pidana dan Pemidanaan	26
BAB III ANALISIS PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM HAL PEMBINAAN TERHADAP WARGA BINAAN YANG MENGALAMI PENYIMPANGAN SEKSUAL	32

3.1 Warga Binaan penyimpangan seksual di dalam lembaga Pemasyarakatan	32
3.1.1 Faktor Hambatan Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan bagi Warga Binaan Penyimpangan Seksual	33
3.2 Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan terhadap Warga Binaan yang Melakukan Penyimpangan Seksual	36
3.2.1 Peranan Khusus di Lembaga Pemasyarakatan terhadap Warga Binaan yang Melakukan Penyimpangan Seksual	38
3.2.2 Konsep Pemidanaan terhadap Warga Binaan yang Mengalami Penyimpangan Seksual di Lembaga Pemasyarakatan	41
BAB IV PENUTUP.....	48
4.1. Kesimpulan.....	48
4.2. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	50